Studi Kasus Pengaruh Dana Desa Terhadap Peningkatan Aset Desa Waru Jaya Menggunakan *Sustainable Livelihood Impact Assessment Method*

Raditya Hendra Pratama
Politeknik Keuangan Negara STAN
h3ndra@pknstan.ac.id

ABSTRACT

After the village fund program runs, it is necessary to review the impact of the Village Fund's performance to determine the achievement of the program with parameters for changes to assets/capital using the SLIA (Sustainable Livelihood Impact Assessment) method, to measure changes in village assets before and after the program. Data on changes in village assets is important to set further policy on the program.

Keywords: *Village-funds, SLIA, impact*

Klasifikasi JEL: H720

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. (Yanhar Jamaluddin, 2018)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa (Permendagri, 2016). Pengelolaan tersebut didukung oleh program Dana Desa yaitu dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dibentuk untuk tujuan memakmurkan masyarakat dengan mengoptimalkan pengelolaan aset desa. (RI, 2017)

Berdasarkan data dari kementerian keuangan tentang total output Dana Desa tahun 2015 sampai 2016, alokasi Dana Desa ialah : terbangunnya jalan desa 95,2 ribu km, Jembatan 914 ribu meter, Sambungan Air Bersih 22.616 unit, Embung Desa 1.338 unit, Polindes 4.004 unit, Pasar Desa 3.106 unit, PAUD Desa 14.957 unit, Sumur 19.485 unit, Drainase & Irigasi 103.405 unit. (Kemenkeu, 2017)

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2015 sampai 2016, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat akan tetapi

alokasi Dana Desa hanya terfokus kepada aset infrastruktur. Dengan demikian, kebijakan Dana Desa merupakan kebijakan baru hasil dari pengembangan kebijakan sebelumnya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Kehidupan masyarakat desa membutuhkan ruang kebebasan untuk bergerak dan untuk saling berkompetisi sekaligus saling bekerjasama dalam suasana tertib dan tenteram penuh kedamaian dan persaudaraan antara sesama warga. Masyarakat desa memerlukan peningkatan kesejahteraan yang semakin berkualitas dan merata yang tercermin dalam struktur keadilan sosial yang tidak adanya kesenjangan antara elit kaya dengan rakyat kebanyakan. (Sukiadi, 2018)

Untuk itu perlu adanya pengkajian tentang bagaimana Dana Desa digunakan secara efektif dengan melakukan analisis serta solusi kepada desa-desa yang perlu pendampingan pemberdayaan pengelolaan Dana Desa.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah sebagai penilaian kinerja dampak kinerja Dana Desa untuk mengetahui pencapaian kinerja dampak program dengan parameter perubahan terhadap asset/modal komunitas kemudian mengetahui perubahan yang mendasar yang dialami oleh komunitas sasaran

2 KERANGKA TEORI

2.1 Dana Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek

pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Kemenkeu, 2017)

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (RI, 2017).

Konsep dasar Dana Desa adalah sebagai pendukung proses pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada (Kemenkeu, 2017).

Alokasi Dana Desa sesuai dengan Undang-undang no 22 tahun 1999 saat diberlakukan, belum memberikan amanat tentang perimbangan atau alokasi dana kepada desa secara jelas, tetapi sejak 2001 sejumlah pemerintah kabupaten/kota melakukan inovasi melahirkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) secara proporsional dengan jumlah yang lebih besar daripada bantuan keuangan sebelumnya. Pengalaman-pengalaman yang baik dari banyak daerah ini diadopsi dengan baik oleh Undang-undang no 32 tahun 2004. Undang-undang no 32 tahun 2004 memperbaiki kelemahan yang terkandung dalam Undang-undang no 22 tahun 1999, yakni mengubah konsep “bantuan” menjadi “bagian”, yang

berarti bahwa desa mempunyai hak untuk memperoleh alokasi sebagian dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota. (Sukiadi, 2018)

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut semakin dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, yang menyatakan bahwa salah satu sumber keuangan desa adalah “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus), setelah dikurangi belanja pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa”. Klausul regulasi inilah yang dijadikan sebagai dasar hukum atas Alokasi Dana Desa (ADD). (Sukiadi, 2018)

Jenis aset desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa yang tertera pada Pasal 2 ayat 1 terdiri atas: Kekayaan asli desa, Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Kekayaan asli desa yang dimaksud, dijelaskan pada ayat selanjutnya yaitu berupa : tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan lain-lain kekayaan asli desa (Permendagri, 2016).

2.2 Metode *Sustainable Livelihoods Framework* (SLIA)

Menurut Abriand (2017) Pendekatan Sustainable Livelihoods berusaha mengidentifikasi hambatan-hambatan paling besar yang dihadapi oleh manusia, dan peluang-peluang yang paling menjanjikan dan terbuka bagi, masyarakat, terlepas dari mana asalnya (misalnya disektor mana, pada

wilayah mana atau tingkat apa, dari lokal sampai internasional). Pendekatan ini dibangun di atas pengertian atau definisi masyarakat sendiri mengenai hambatan dan peluang tersebut dan, bila memungkinkan, pendekatan ini selanjutnya bisa membantu masyarakat membicarakan/menyadari hambatan dan peluang tersebut.

Sumber Daya Penghidupan Berkelanjutan (*sustainable livelihoods capital*) Kemampuan untuk mengejar penghidupan dapat ditemui perbedaan tergantung pada kebijakan sosial (kebijakan adat dan kebijakan masyarakat) serta kekuatan masing-masing sumber daya yang dimiliki suatu keluarga atau individu, keadaan sesungguhnya dimasyarakat (kondisi alam dan lingkungan). Pada pendekatan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihoods*) memiliki beberapa sumber daya yang digunakan dalam sebuah penghidupan berkelanjutan, sumber daya-sumber daya ini merupakan sumber untuk mencari tingkat kerentanan sekaligus sebagai alat untuk pencapaian penghidupan yang berkelanjutan.

Menurut (Wigati & Fitrianto, 2012) dalam judul makalah “Pendekatan *Sustainable Livelihood Framework* Dalam Rangka Membongkar Dominasi Tengkulak Melalui Kegiatan Keagamaan” dalam metodologi penelitian yang sama memiliki persamaan *Sustainable Livelihood Framework* dengan empat variable analisis yaitu analisis potensi dan akses sumber daya, analisa kerentanan dan kapasitas, analisa kebijakan, kelembagaan dan proses, serta melihat sejauh mana pengaruh global/pasar terhadap kerentanan masyarakat dan arah penelitian yang berfokus pada penelitian usaha mikro.

Menurut Koen Kusters (2006) metodologi SLIA digunakan untuk mendapatkan pembahasan yang rinci pada kajian atas lima aset yang terdapat pada metodologi SLIA tersebut.

Menurut Hulme (2000) aplikasi praktis pada metodologi SLIA difokuskan untuk kajian dampak pada usaha mikro. Sedangkan menurut Hussein (2000) upaya

pengakajian dampak dengan *impact assessment methodology* memiliki fokus analisis yang terpusat di mata pencaharian.

Menurut Kaatje Segers (2005) dalam pembahasan makalahnya yang berjudul “Pendekatan Mata Pencaharian Berkelanjutan sebagai alat penilaian dampak untuk intervensi pembangunan di pedesaan Tigray, Ethiopia: peluang & tantangan” yang membahas langsung tentang pembangunan desa disertai peluang dan tantangan kedepannya. kemudian analisis dampak eksploratif kekuatan aset dan kondisi kerentanan penghidupan petani padi sebagai dampak alokasi ruang kota pada koridor jalan hamparan rawang.

3 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Waru Jaya yang beralamat di Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan selama Satu Minggu 24 Juni sampai 10 Juli 2019

Penelitian ini melakukan kajian evaluasi dampak program menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (metode penelitian campuran/*mixed methods*). Dalam hal ini, metode kuantitatif digunakan untuk mengukur secara obyektif terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam segala aspek terkait maupun berpengaruh terhadap fenomena sosial tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari lapangan (*field research*). Data primer diperoleh dari wawancara informan kunci secara mendalam dan hasil kuesioner yang diberikan kepada penerima manfaat dari pengelola aparatur desa dan penerima manfaat dari Dana Desa Waru Jaya.

Data primer dimaksud diperoleh menggunakan metode *Most Significant Change* (MSC) untuk melihat sejauh mana perubahan yang paling berpengaruh dan diakui oleh masyarakat dari dampak pelaksanaan program tersebut, dan *Story*

Raditya Hendra Pratama

Change (SC) untuk mendapatkan cerita perubahan yang murni dirasakan dan disepakati oleh komunitas dan perubahan individu atau kelompok kecil pada objek (Wigati & Fitrianto, 2012).

Metode SLIA, untuk mengukur perubahan aset komunitas sebelum dan sesudah program. Data perubahan merupakan hasil pengakuan dari responden yang diperoleh dari wawancara mendalam, melalui kuisioner yang terukur. Aset yang diukur adalah aset alam, aset fisik, aset sumberdaya manusia (SDM), aset finansial dan aset sosial. Hasil kuantitatif dengan membandingkan nilai (*score*) antara sebelum dan setelah program berjalan dengan merujuk kuesioner penelitian terdahulu sebagai rujukan kriteria dalam menilai perubahan aset (Kaatje Segers, 2005).

Menggunakan skala Likert yang menunjukkan nilai dari 1 sampai 5 yang menunjukkan nilai sangat kurang, kurang, cukup, baik dan sangat baik. skala perubahannya dari nilai 0 sampai nilai 5 dimana 0 – 0,49 itu tetap, 0,50-1,49 sedang, 1,50 -2,99 tinggi, dan 3-5 sangat tinggi.

Gambaran dasar dari konteks, struktur, proses, strategi dan outcome dari kerangka kerja *sustainable livelihood* yang diuraikan dalam “*Sustainable Livelihoods Guidance Sheets*,” Menurut (Kaatje Segers, 2005) sebagai berikut:

Kerangka Kerja Penghidupan Berkelanjutan

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 perubahan aset komunitas

Jenis Aset	Sebelum Program	Sesudah Program	Varian
Aset Alam	2.00	2.50	0,50
Aset Fisik	0.95	3.00	2,05
Aset SDM	1.05	2.10	1,05
Aset Finansial	0.60	0.90	0,30
Aset Sosial	1.75	2.60	0,85

Hasil penilaian perubahan 5 aset komunitas adalah sbb:

- Aset alam naik sebesar 0,50
- Aset fisik/infrastruktur naik sebesar 2,05
- Aset sumber daya manusia naik sebesar 1,05
- Aset keuangan naik sebesar 0,30
- Aset sosial naik sebesar 0,85

Hasil penilaian terhadap komponen aset tersebut menggambarkan bahwa perubahan yang terjadi antara sebelum dan setelah program secara umum mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Perubahan yang paling signifikan terdapat pada aset fisik/infrastruktur naik sebesar 2,05, kemudian pada aset sumber daya manusia naik sebesar 1,05. Pada aset sosial yaitu naik sebesar 0,85, dan pada aset alam naik sebesar 0,50. Sedangkan pada keuangan manusia menurut responden naik sebesar 0,30

4.1 Aset Alam

Tabel 2 : analisis aset alam

ASPEK	SEBELUM	SESUDAH	VARIAN
ASET ALAM	2,00	2,50	0,50
Kualitas kondisi tanah pada desa	1,90	2,50	0,60
Ketersediaan air untuk Warga Desa	2,10	2,50	0,40

Penilaian aset alam merujuk kepada komponen yang ada di kuesioner SLIA yaitu kualitas kondisi tanah desa dan ketersediaan air untuk warga desa. Data skoring perubahan aset alam menunjukkan adanya perubahan nilai antara sebelum dan setelah program, dari 2,00 menjadi 2,50. Perubahan yang terjadi naik sebesar 0,50 poin.

Perubahan sebesar 0,50 poin menunjukkan penilaian aset alam naik cukup signifikan dalam artian skala perubahan aset alam memiliki nilai “**Sedang**”. Beberapa faktor terkait dengan perubahan sebelum dan setelah program pada aset alam yaitu: Kualitas kondisi tanah desa dan ketersediaan air untuk warga.

4.2 Aset Fisik/Infrastruktur

Tabel 3 : analisis aset fisik

ASPEK	SEBELUM	SESUDAH	VARIAN
ASET FISIK/INFRASTRUKTUR	0,95	3,00	2,05
Ketersediaan bangunan aktivitas masyarakat desa berupa jalan	1,00	3,20	2,20
Sarana prasarana kelembagaan komunitas Desa	0,90	2,80	1,90

Penilaian aset fisik/infrastruktur merujuk kepada komponen kuesioner SLIA yaitu Ketersediaan bangunan untuk mendukung aktivitas masyarakat desa berupa jalan dan Sarana prasarana kelembagaan komunitas Desa. Data skoring perubahan aset fisik/infrastruktur menunjukkan adanya

perubahan nilai antara sebelum dan setelah program, dari 0,95 menjadi 3,00. Perubahan yang terjadi sebesar 2,05.

Perubahan sebesar 2,05 poin menunjukkan penilaian aset fisik/infrastruktur naik signifikan dalam artian skala perubahan aset fisik memiliki nilai “**Tinggi**”. Beberapa catatan terkait dengan perubahan sebelum dan setelah program pada aset fisik/infrastruktur yaitu: pendirian bangunan kantor desa Waru Jaya, pembangunan jalan desa dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk masyarakat.

4.3 Aset Sumber Daya Manusia

Tabel 4 : analisis aset sumber daya

ASPEK	SEBELUM	SESUDAH	VARIAN
ASET SUMBER DAYA MANUSIA	1,05	2,10	1,05
Keterampilan teknis usaha masyarakat desa	0,70	2,20	1,50
Keterampilan manajemen bisnis/usaha milik desa	1,40	2,00	0,60

Penilaian aset sumber daya manusia merujuk kepada komponen yang ada di kuesioner SLIA yaitu Pengetahuan dan keterampilan teknis/budidaya dan Pengetahuan dan keterampilan teknis/pasokan. data skoring perubahan aset sumber daya manusia menunjukkan adanya perubahan nilai antara sebelum dan setelah program, dari 1,05 menjadi 2,10. Perubahan yang terjadi naik sebesar 1,05.

Perubahan sebesar 1,05 poin menunjukkan penilaian aset sumber daya manusia naik akan tetapi cukup signifikan dalam artian skala perubahan aset sdm memiliki nilai “**sedang**”. Beberapa catatan terkait dengan perubahan sebelum dan setelah program pada aset sumber daya manusia yaitu: Mulai adanya pelatihan BLK (Badan Latihan Keterampilan) dengan memberikan keterampilan masyarakat dengan menajahit, ternak ikan, dan pelatihan Muballig.

4.4 Aset Keuangan

Tabel 5 : analisis aset fisik

ASPEK	SEBELUM	SESUDAH	VARIAN
ASET KEUANGAN	0,60	0,90	0,30
Tingkat penghasilan rumah tangga	0,90	1,80	0,90
Jumlah tabungan/simpanan/aset produktif (uang, ternak, perhisasan, dll)	0,20	0,40	0,20
Akses layanan keuangan/modal	0,70	0,50	-0,20

Penilaian aset keuangan merujuk kepada komponen yang ada di kuesioner SLIA yaitu Tingkat penghasilan rumah tangga dan Jumlah tabungan/simpanan/aset produktif (uang, ternak, perhisasan, dll) juga Akses layanan keuangan/modal. Data skoring perubahan aset keuangan menunjukkan adanya perubahan nilai antara sebelum dan setelah program, dari 0,60 menjadi 0,90. Perubahan yang terjadi naik sebesar 0,30. Perubahan sebesar 0,30 poin menunjukkan penilaian aset finansial yang kenaikannya sangat kecil, dalam artian skala perubahan aset keuangan memiliki nilai “**Tetap**”.

Beberapa catatan terkait dengan perubahan sebelum dan setelah program pada aset keuangan yaitu: Belum adanya fokus pembangunan ekonomi masyarakat, dan belum berjalannya BUMDes. Peningkatan pendapatan yang cenderung rendah. Dan belum terwujudnya akses permodalan yang aman dan diterima masyarakat.

4.5 Aset Sosial

Tabel 6 : analisis aset sosial

ASPEK	SEBELUM	SESUDAH	VARIAN
ASET SOSIAL	1,75	2,60	0,85
Tingkat perkembangan kelompok yang telah dibentuk	0,70	1,60	0,90
Semangat saling membantu/gotong-royong/ kebersamaan di antara anggota kelompok	2,30	2,80	0,50

Tingkat kerentanan terhadap konflik di tengah masyarakat	2,20	3,20	1,00
Partisipasi dan peran kelompok dalam pembangunan desa	2,10	3,20	1,10

Penilaian aset sosial merujuk kepada komponen yang ada di kuesioner SLIA yaitu Tingkat perkembangan kelompok yang telah dibentuk, Semangat saling membantu/gotong-royong /kebersamaan di antara anggota kelompok, Tingkat kerentanan terhadap konflik di tengah masyarakat dan Partisipasi dan peran kelompok dalam pembangunan desa. Data skoring perubahan aset sosial menunjukkan adanya perubahan nilai antara sebelum dan setelah program, dari 1,75 menjadi 2,60. Perubahan yang terjadi naik sebesar 0,85.

Perubahan sebesar 0,85 poin menunjukkan penilaian aset sosial naik cukup signifikan dalam artian skala perubahan aset sosial memiliki nilai “Sedang”. Beberapa catatan terkait dengan perubahan sebelum dan setelah program pada aset sosial yaitu: Terbentuknya komunitas dan forum pemberdayaan masyarakat, naiknya tingkat kontribusi masyarakat terhadap pembangunan desa, menurunnya konflik dengan pemberdayaan pemuda dan semangat partisipasi masyarakat yang naik.

Tabel 7: Rekapitulasi Hasil Penilaian Aset Komunitas & Faktor Kerentanannya

No	Aset Komunitas	Nilai	Kategori Penilaian	Faktor Kerentanan
1	Aset Alam	2,50	Kurang menuju cukup	- Ketersediaan air yang belum merata sehingga sering menimbulkan masalah pada distribusi air
2	Aset Fisik	3,00	Cukup	- Terhambatnya proses pembangunan Badan usaha milik desa dan fasilitas umum seperti akses jalan.
3	Aset SDM	2,10	Kurang menuju Cukup	- Kurangnya optimalisasi keterampilan masyarakat desa

				- Kurangnya sosialisasi media pelatihan keterampilan untuk masyarakat
4	Aset Finansial	0,90	Sangat kurang menuju kurang	- Keterbatasan penyediaan modal untuk masyarakat - Masyarakat cenderung lebih memilih transaksi syariah (tanpa riba)
5	Aset Sosial	2,60	Kurang menuju cukup	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk gotong royong dalam pemabangunan desa

4.6 Analisis Derajat Keberlanjutan

Tabel 8 : Rekapitulasi kategori penilaian faktor keberlanjutan program

No	Faktor Keberlanjutan Komunitas	Kategori Penilaian	Dasar Penilaian
1	Aspek Kerentanan Terhadap Perubahan Eksternal	Kurang	Keterbatasan dana untuk pengelolaan ekonomi masyarakat serta pengembangan program Dana Desa yang teralalu fokus pada aset fisik desa.
2	Aspek Aset Komunitas	Cukup	1 aset memiliki nilai cukup, 3 aset memiliki nilai kurang menuju cukup, 1 aset memiliki nilai sangat kurang menuju kurang.

Dari kedua faktor tersebut, meski secara internal komunitas masih memiliki keterbatasan, namun dengan memperhatikan semangat dan kemauan untuk maju dari masyarakat desa waru jaya “tingkat keberlanjutan program “Kurang Menuju Cukup” dengan catatan segera dilakukan perkuatan terhadap aspek - aspek yang masih lemah. Termasuk meningkatkan kesiapan

masyarakat dalam berpartisipasi penuh dengan program pengoptimalan Dana Desa.

Satu kondisi yang membuat keberlanjutan program ini masih rentan adalah kurangnya aspek permodalan sehingga program masih belum diupayakan maksimal karena keterbatasan tersebut.

5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Secara umum, terjadi peningkatan di lima aset yang dikaji. Namun peningkatannya masih tergolong kecil (hanya aset fisik yang mencapai nilai 2). Peningkatan perubahan aset tertinggi adalah aset Fisik dan terendah aset Keuangan/Finansial. Aset Fisik dinilai tinggi, yaitu pembangunan sarana-sarana umum seperti betonisasi jalan dan gedung kantor desa yang sangat mendukung aktivitas operasional perangkat desa dan masyarakat yang berkeperluan. Perubahan aset Keuangan/Finansial rendah, karena secara layanan permodalan yang sebelumnya beroperasi saat ini sudah berhenti atau bahkan tutup.

Aset Sosial: di tengah masyarakat yang rukun, mereka merasa sangat senang dengan terbentuknya komunitas-komunitas pemberdayaan pemuda karena dapat mempererat ikatan sosial sekaligus menjadi wadah untuk pengembangan potensi diri dalam berbagai keterampilan.

Aset SDM : peningkatan kapasitas masih sebatas penambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan, belum masuk ke dalam praktek/aplikasi keseharian. Peningkatan berupa pelatihan atas kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK).

Aset Alam: peningkatan aset alam yang kurang signifikan ini merupakan hal yang wajar, akan tetapi pemanfaatan lahan yang tersedia masih perlu perhatian lebih.

Secara umum program Dana Desa telah mampu meningkatkan asset dasar masyarakat desa Waru Jaya dengan peningkatan yang sedang pada beberapa aset dan besar hanya pada asset fisik.

Secara umum nilai 5 asset komunitas cukup mendukung untuk menopang sumber pehidupan yaitu beternak ikan. Namun masih perlu perhatian pada asset Keuangan (0,90). 4 asset lainnya cukup meskipun masih perlu ditingkatkan lagi agar semakin baik dalam mendukung sumber penghidupan (livelihood) masyarakat desa Waru Jaya.

Secara spesifik, program telah mampu menyediakan sarana prasarana dan fasilitas untuk mendukung penghidupan masyarakat. Sedangkan aspek yang dinilai perlu perhatian untuk penguatan (nilai <2) adalah pengelolaan lahan kosong, distribusi modal usaha untuk masyarakat yang belum tersedia secara konsistendan pembentukan perkumpulan atau komunitas peternak ikan sebagai media pengembangan diri dan pendapatan, serta perlunya penguatan jejaring bisnis peternak dengan pasar diluar desa.

Derajat keberlanjutan program sedang dan perlu pembenahan pada sektor-sektor yang masih dianggap kurang serta peningkatan pada tiap titik aset dengan pemberdayaan yang terencana dan terstruktur.

	modal usaha kelompok	pendapatan masyarakat.
Aset Sosial	Menguatkan kelompok masyarakat yang sudah terbentuk dan mengedukasi perihal kontribusi dalam pembangunan desa	Menjadwalkan rapat koordinasi tersistem setiap pekannya guna menjaga rasa persatuan masyarakat
Aspek Kerentana-n	Menyediakan pelayanan yang bergerak di bidang permodalan sebagai solusi dari kurangnya tingkat finansial masyarakat	Berkerjasama dengan lembaga atau institusi luar guna membangun lembaga permodalan dengan SDM yang memumpuni di bidangnya
Transform-asi Struktur & Proses	Membangun kelompok atau memberdayakan yang sudah ada dalam kapasitas keterampilan dan pengelolaan usaha Menjalinkan kerjasama usaha dalam bidang pemasaran dan permodalan	Desa membentuk sebuah lembaga sebagai wadah dari utusan tiap komunitas yang terjalin Membangun lembaga keuangan profesional yang mampu menyediakan modal untuk masyarakat dan menjalin kerjasama dengan BUMDes lain dalam pemasaran

5.2 Rekomendasi strategis

Subyek	Ruang Perbaikan	Rekomendasi Aksi
Aset Komunitas	-	-
Aset Alam	Kegiatan/upaya penignkatan pelayanan ketersediaan air bagi masyarakat.	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait dengan sumber daya air alternatif dengan sumur bor.
Aset Fisik	Peningkatan sarana dan prasarana untuk masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan infrastruktur.	Pembangunan koperasi masyarakat desa dan pembangunan berkala aset fisik desa.
Aset Sumberda-ya Manusia	Pelatihan keterampilan masyarakat yang belum merata.	Pembagian kelompok masyarakat dan disertai dengan pelatihan keterampilan masyarakat sistem monitoring
Aset Finansial	Penyisihan hasil pendapatan masyarakat untuk	Pelatihan & monitoring cara penyisihan hasil

6 IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan dampak dana desa terhadap peningkatan nilai aset desa sesuai dengan kriteria pada SLIA. Penelitian ini masih terbatas pada satu desa saja, sehingga perlu dilakukan penelitian kepada desa-desa lain untuk memberikan gambaran secara lebih luas dan lengkap.

7 PENGHARGAAN (ACKNOWLEDGEMENT)

Pada Bagian ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian artikel ini, khususnya rekan dari STEI SEBI dan Desa Waru Jaya yang membantu pengumpulan data. Penulis menyampaikan tanggung jawab terhadap hasil

penelitian termasuk *error* yang kemungkinan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA (*REFERENCES*)

- Abriand, E. (2017). Efektivitas Program Pemulihan Mata Pencarian (Pap) Di Desa Batusari Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang 2017, . *Jurnal Penelitian dan KPM Juli 2017 Vol 4, No: 2*.
- Hulme, D. (2000). Impact Assessment Methodologies for Microfinance Theory, Experience and Better Practice. *World Development Vol. 28, No. 1, pp. 79±98*.
- Hussein, C. A. (2000). Developing Methodologies for Livelihood Impact Assessment: Experience of the African Wildlife Foundation in East Africa. *Overseas Development Institute*.
- Kaatje Segers, J. D. (2005). The Sustainable Livelihoods Approach as an impact assessment tool for development interventions in rural Tigray, Ethiopia: opportunities & challenges. *Proceedings of the conference on poverty and development in Ethiopia: challenges and options*. Addis Ababa: Institute of Development Research, Addis Ababa University.
- Kemenkeu. (2017). *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umat)*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Koen Kusters, R. A. (2006). Balancing Development and Conservation? An Assessment of Livelihood and Environmental Outcomes of Nontimber Forest Product Trade in Asia, Africa, and Latin America. *Ecology and Society*.
- Permendagri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. *Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia*.
- RI, K. K. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kemenkeu.
- Sukiadi, T. (2018). *Desa Development Index*. ciputat: Dompot Dhuafa.
- Wigati, S., & Fitrianto, A. R. (2012). PENDEKATAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK DALAM RANGKA MEMBONGKAR DOMINASI TENGGULAK MELALUI KEGIATAN KEAGAMAAN. *Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 2 Tahun 2013*.
- Yanhar Jamaluddin, A. S. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah . *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 14-24.